

Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI

PSAK 46 and
Income Statement

31

Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan
Bogor, Indonesia
E-Mail: hastoni@stiekesatuan.ac.id

Submitted:
JANUARI 2014

Accepted:
APRIL 2014

ABSTRACT

The company follows a accounting standards generally accepted in drawing up the financial statements, namely Financial accounting standards (SAK). For various reasons, that standard is different from the taxation provisions also utilize accounting information. Due to the difference of a few things in Financial accounting standards (SAK) with the provisions of the Regulation militate in% u2013 Invitation taxation. Bond Accountant Indonesia (IAI) has confirmed the Statements of financial accounting standards (PSAK) No. 46 concerning accounting for income taxes, is a new thing in the accounting standards for enterprises in Indonesia. PSAK No. 46. The purpose of this research is to know concerning PSAK NO. 46 and see if PSAK NO. 46 already applied on the PT Astra International Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk. And how its influence from the application of PSAK NO.46 of the income statement of the company. The study was conducted at the corner of Indonesia stock exchange at STIE Kesatuan Bogor. The results showed that in the application of PSAK NO. 46 will develop assets and deferred tax liabilities interest arising due to temporary differences. The influence of the application of PSAK NO. 46 on the income statements give rise to a difference between the burden of income tax with income tax debt resulting from the existence of differences in recognition of tax-deferred interest assets, which is set to PSAK NO. 46.

Keywords : PSAK 46, Deferred Tax Assets, Income Tax Expenses

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan mengikuti suatu standar akuntansi yang diterima secara umum dalam menyusun laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan berbagai alasan, standar itu berbeda dengan ketentuan perpajakan yang juga memanfaatkan informasi akuntansi. Akibat adanya perbedaan beberapa hal dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, maka laba keuangan sebelum pajak (*pretax financial income*) atau laba untuk tujuan pembukuan, berbeda dengan laba kena pajak (*taxable income*) untuk tujuan perpajakan.

Melalui permasalahan yang timbul di atas, maka pada tanggal 23 Desember 1997, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Di dalam PSAK 46, diatur mengenai pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Apabila sebelumnya perusahaan menggunakan "*tax payable method*" dalam akuntansi pajak penghasilan, maka dengan diberlakukannya PSAK 46, perusahaan harus

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 2 No. 1, 2014
pg. 31 - 46
STIE Kesatuan
ISSN 2337 - 7852

melakukan perubahan mendasar dalam akuntansi pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan perusahaan harus menghitung dan mengakui "pajak tangguhan" (*deferred tax*) atas "*future tax effects*" dengan menggunakan "*balance sheet liability method*" atau disebut juga "*asset/liability method*".

Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan PSAK 46 terhadap laporan laba rugi pada Tiga Perusahaan yang terdaftar di BEI.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui PSAK No.46 pada Tiga Perusahaan yang terdaftar di BEI
2. Untuk mengetahui laporan laba rugi pada Tiga Perusahaan yang terdaftar di BEI
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan PSAK No.46 terhadap laporan laba rugi pada Tiga Perusahaan yang terdaftar di BEI.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut pendapat Prof.Dr.Rochmat, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak, pada buku Erly Suandy (2008,7) definisi pajak adalah :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R.A Seligman dalam buku *Essay in Taxation* adalah "*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*".

Terdapat dua fungsi pajak yang terdiri dari fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur),

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah.
2. Fungsi regularend (pengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument pengatur melalui kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pajak Penghasilan

Undang – undang mengenai Pajak penghasilan pertama kali dikeluarkan adalah UU No. 7 Tahun 1983 kemudian dirubah menjadi UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994 kemudian diubah lagi menjadi UU No.17 Tahun 2000. Undang – undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008.

Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang – undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung dan cara melunasi pajak terutang. Undang – undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan keajiban perpajakan.

Menurut PSAK Nomor 46 Paragraf 4, "pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas". Pengertian penghasilan ini tidak memperlihatkan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi lebih kepada adanya penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak.

Laporan Keuangan

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta Laporan Perubahan Modal, dimana Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu,

sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan – alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan No.01 per 1 Oktober 2004 dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah :

Perhitungan neraca dan perhitungan Rugi Laba serta segala keterangan– keterangan yang dimuat dalam lampiran – lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana – dana yang memuat segala hal yang berkaitan mengenai keuangan.

IAI mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut :

Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus dana), dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut pendapat Jan William dan Susan Haka (2003) dalam buku "*Financial Accounting*" bahwa definisi laporan keuangan adalah "*A financial statement, therefore is simply a monetary declaration of what is believed to be true about an enterprise*".

Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Kieso et al. (2004) berpendapat, "*The income statement, often called the statement of income or statement of earnings, is the report that measures the success of enterprise operations for a given period of time*".

Mengenai kegunaan dari laporan laba rugi Kieso et al. (2004) menyatakan,

The income statement provides investors and creditors with information that helps them predict the amounts, timing, and uncertainty of future cash flows. Also, the income statement helps users determine the risk (level of uncertainty) of not achieving particular cash flow".

Terkait hal yang sama, IAI (2002) menyatakan,

Informasi kinerja keuangan perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Laporan Posisi Keuangan (*Neraca*)

Horngrental (2002) mendefinisikan neraca sebagai berikut, "*The balance sheet is all the entity's assets, liabilities, and owner's equity as of a specific date, usually the end of a month or a year*". Sedangkan Kieso et al. (2004) menyatakan, "*The balance sheet, sometimes referred to as the statement of financial position, reports the assets, liabilities, and stockholders' equity of a business enterprise at a specific date*".

Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No.46

Untuk laporan keuangan akuntansi, sekurang – kurangnya satu kali dalam satu tahun perusahaan menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang disebut sebagai laporan keuangan komersial. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan yaitu untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atas wajib pajak, maka disajikannya laporan fiskal yang disusun selain berdasarkan SAK juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan fiskal disusun dengan cara melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akibat adanya perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya antara undang – undang perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (PSAK No.46) merupakan jembatan atas perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial (berdasarkan SAK) dan laporan keuangan fiskal. Dengan menerapkan PSAK No.46 ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui adanya konsekuensi pajak dimasa

mendatang (*future tax effects*) yang diakibatkan karena adanya perbedaan temporer dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan sesuai prinsip akrual. Sedangkan untuk perbedaan tetap tidak diperhitungkan karena tidak memiliki *future tax effects*.

Dengan adanya penerapan PSAK No.46 ini, maka terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan menurut Fransisca W.O dalam buku *Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan (2008,134)* :

1. Laporan Neraca
Didalam neraca akan muncul akun baru yaitu aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan yang disajikan secara neto, dimana pajak kini dan pajak tangguhan disajikan terpisah serta pajak tangguhan disajikan sebagai harta atau kewajiban tidak lancar.
2. Laporan Laba Rugi
Pada laporan laba rugi akan muncul beban (penghasilan) pajak tangguhan sebagai bagian dari beban (penghasilan) pajak yang semula hanya terdiri dari beban (penghasilan) pajak kini yang diunakan sebagai dasar untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan terutang. Kewajiban pajak tangguhan akan menimbulkan beban pajak tangguhan pada perhitungan beban pajak tangguhan pada perhitungan beban pajak sehingga akan menambah beban pajak sedangkan aktiva pajak tangguhan akan menimbulkan penghasilan pajak tangguhan pada perhitungan beban pajak sehingga akan mengurangi beban pajak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang menetapkan jenis informasi yang harus dikumpulkan, sumber data dan prosedur pengumpulan data. Analisis pengaruh penerapan PSAK No. 46 dilakukan dengan metode penelitian deskriptif asosiatif dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis. Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha mengembangkan teori yang sudah ada tentang penerapan PSAK 46 dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan laba rugi. Variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel / Sub Variabel	Indikator	Skala / Ukuran
Penerapan PSAK No.46	Pengakuan	Ordinal
	Pengukuran	Ordinal
	Pengungkapan	Ordinal
	Penyajian	Ordinal
Laporan Laba Rugi	Pajak Kini	Rasio
	Beda Temporer	Rasio
	Beda Permanent	Rasio
	Pajak Tangguhan	Rasio

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara : 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan guna mendapatkan teori – teori yang akan digunakan sebagai dasar pengamatan dan perbandingan dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku yang berkenaan dengan topic yang akan dibahas. 2) *Searching* dari Internet, Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari di internet. Hal ini digunakan untuk mencari data–data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti. Selain itu juga teknik ini digunakan untuk melihat apabila ada perubahan mengenai tarif pajak penghasilan ataupun perubahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif asosiatif , yaitu menguraikan identifikasi masalah secara rinci dan sistematis dengan penekanan pada perbandingan antara hasil penelitian dengan teori terkini dan relevan yang diperoleh dari riset kepustakaan. Peneliti membandingkan data sebelum dilakukan penerapan PSAK No.46 dan sesudah dilakukannya penerapan PSAK No.46. Kemudian hasil dari penelitian ini akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan dengan landasan-landasan teorinya untuk mengetahui bagaimana pengaruh atau keterkaitannya serta mencoba

mengumpulkan data secara tertulis untuk membandingkan suatu aplikasi nyata sebagai praktek sesungguhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PSAK 46 pada Laporan Keuangan Tiga Perusahaan yang Terdaftar di BEI

Sebagaimana kita ketahui bahwa penerapan suatu PSAK akan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam penyajian laporan keuangan. Begitu pun dalam penerapan PSAK 46, tentang Pajak Penghasilan. Dapat dilihat dalam laporan keuangan Tiga Perusahaan yang terdaftar di BEI terdapat beban pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, maupun liabilitas pajak tangguhan. Pos-pos tersebut merupakan pos-pos yang dibahas dalam PSAK 46 mengenai pajak penghasilan.

Berikut ini penerapan PSAK 46 pada Tiga Perusahaan yang menerapkan PSAK 46 dengan mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada neraca, serta pajak kini dan pajak tangguhan (beban pajak penghasilan) pada laporan laba rugi.

1. PT. Astra Internasional, Tbk.

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Astra Internasional Tbk, terdapat pos pajak dibayar dimuka (*prepaid taxes*) pada bagian aset lancar. Dilihat dari perhitungan dibawah, besarnya pajak dibayar dimuka (*prepaid taxes*) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp 1.491 dan Rp 1.190 (dalam miliaran).

Tabel 2 Pajak dibayar dimuka PT. Astra Internasional, Tbk

Keterangan	2012	2011
Perseroan		
Pajak Penghasilan Badan	9	
Pajak Penjualan Barang Mewah	209	137
	218	137
Entitas anak		
Pajak Penghasilan Badan	908	594
Pajak Pertambahan Nilai	359	454
Pajak Penjualan Barang Mewah	6	5
	1.273	1.053
	1.491	1.190

Pajak dibayar di muka ini merupakan pembayaran pajak yang berasal dari pembayaran atas pajak penghasilan badan (*Corporate Income Tax*), Pajak Penjualan Barang Mewah (*Luxury Tax*), Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai (*value Added Tax*) perseroan dan entitas anak.

Pajak dibayar dimuka merupakan kelebihan bayar pajak penghasilan badan dan pajak lainnya yang belum diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") serta pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diterima oleh Grup dimana keberatan dan banding telah diajukan kepada DJP.

Kemudian, pada bagian Liabilitas Jangka Pendek terdapat pos utang pajak (*Taxes Payable*) per 31 Desember 2012 sebesar Rp 1.886 dan Rp1.596 (dalam miliaran) per 31 Desember 2011. Nilai tersebut didapat dari jumlah pajak penghasilan terutang yang belum dibayarkan perseroan dan entitas anak baik pajak penghasilan pasal 21, 23, 25, 26 dan 29 maupun pajak pertambahan nilai.

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Astra Internasional Tbk, terdapat pos Aset Pajak Tangguhan. Pos tersebut merupakan akumulasi pajak tangguhan perusahaan yang berasal dari beda temporer. Dapat kita lihat per 31 Desember 2011 aset pajak tangguhan perusahaan adalah Rp 1.408 sedangkan per 31 Desember 2012 aset pajak tangguhan perusahaan adalah sebesar Rp 1.957, dari data tersebut dengan kata lain terdapat peningkatan asset pajak tangguhan sebesar Rp 549. Peningkatan tersebut berasal dari perbedaan temporer yang dapat dipulihkan di kemudian hari atau periode yang akan datang.

Tabel 3 Utang Pajak PT. Astra Internasional, Tbk

Keterangan	2012	2011
Perseroan		
Pajak penghasilan		
Pasal 21	189	168
Pasal 23 dan 26	27	24
Pasal 25/29	166	60
Pajak pertambahan nilai	144	113
	526	365
Entitas anak		
Pajak penghasilan:		
Pasal 21	289	270
Pasal 22	-	1
Pasal 23 dan 26	69	63
Pasal 25/29	939	854
Pajak pertambahan nilai	46	30
Pajak penjualan barang mewah	17	11
Pajak bumi dan bangunan	-	2
	1.360	1.231
	1.886	1.596

Tabel 4 Aset Pajak Tangguhan PT. Astra Internasional, Tbk tahun 2012

Keterangan	Pada awal tahun	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan/ (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain	Reklasi-fikasi	Lain-lain	Pada akhir tahun
Tahun 2012						
Aset pajak tangguhan						
Perseroan						
Akrua	447	92				539
Liabilitas imbalan kerja	86	23	11			120
Lain-lain	1	3	2			4
Aset pajak tangguhan	534	112	9			655
Perseroan, bersih						
Aset pajak tangguhan	874	380	163	(116)	1	1.302
Entitas anak, bersih	1.408	492	172	(116)	1	1.957
Liabilitas pajak tangguhan	(1.835)	94	6	116	(1.249)	(2.868)
Entitas anak, bersih						
Tahun 2011						
Aset pajak tangguhan						
Perseroan						
Akrua	447	92				539
Liabilitas imbalan kerja	86	23	11			120
Lain-lain	1	3	2			4
Aset pajak tangguhan	534	112	9			655
Perseroan, bersih						
Aset pajak tangguhan	874	380	163	(116)	1	1.302
Entitas anak, bersih	1.408	492	172	(116)	1	1.957
Liabilitas pajak tangguhan	(1.835)	94	6	116	(1.249)	(2.868)
Entitas anak, bersih						

Dari uraian di atas, terlihat bahwa aset pajak tangguhan didapat dari adanya aktual ditambahkan dengan liabilitas imbalan kerja dan lain-lain pada akhir tahun.

2. PT. Mustika Ratu, Tbk

Pada PT. Mustika Ratu Tbk, terdapat pos pajak dibayar dimuka (*prepaid taxes*) pada bagian aset lancar. Besarnya pajak dibayar dimuka (*prepaid taxes*) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp 200.870.490. Pajak dibayar dimuka ini mempunyai nilai yang sama dikarenakan merupakan pajak yang berasal dari pajak pertambahan nilai entitas anak (*Value Added Tax of a Subsidiary*).

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Mustika Ratu Tbk, terdapat pos Aset Pajak Tangguhan. Pos tersebut merupakan akumulasi pajak tangguhan perusahaan yang berasal dari beda temporer.

Tabel 5 Aset Pajak Tangguhan PT. Mustika Ratu, Tbk

Keterangan	2012	2011
Perseroan		
Aset pajak tangguhan		
Imbalan kerja	2.549.039.245	2.143.813.610
Liabilitas pajak tangguhan		
Penyusutan	(811.255.447)	(533.613.399)
	1.737.813.798	1.610.200.211
Entitas anak dalam negeri		
Aset pajak tangguhan		
Imbalan kerja	483.391.405	584.337.710
Penyisihan piutang	239.617.204	-
Liabilitas pajak tangguhan		
Penyusutan	(346.367.008)	(581.093.175)
	376.641.601	3.244.535
Aset pajak tangguhan-bersih	2.114.455.399	1.613.444.746
Entitas anak dalam negeri		
Liabilitas pajak tangguhan	-	333.792.810
Liabilitas pajak tangguhan-bersih	-	333.792.810

37

Dapat kita lihat per 31 Desember 2011 aset pajak tangguhan perusahaan adalah Rp 1.613.444.746 sedangkan per 31 Desember 2012 aset pajak tangguhan perusahaan adalah sebesar Rp 2.114.455.399, dari data tersebut dengan kata lain terdapat peningkatan asset pajak tangguhan sebesar Rp 501.010.653. Peningkatan tersebut berasal dari perbedaan temporer yang dapat dipulihkan di kemudian hari atau periode yang akan datang. Aset pajak tangguhan ini didapat dari imbalan kerja perseroan dan imbalan kerja dan penyisihan piutang entitas anak.

Kemudian, pada bagian Liabilitas Jangka Pendek terdapat pos utang pajak (*Taxes Payable*) per 31 Desember 2012 sebesar Rp 8.219.094.398 dan Rp 5.735.786.503 per 31 Desember 2011. Nilai tersebut didapat dari jumlah pajak penghasilan terutang yang belum dibayarkan.

Tabel 6 Utang Pajak PT. Mustika Ratu, Tbk

Keterangan	2012	2011
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 ayat 2	310.003.987	208.563.926
Pasal 21	400.203.519	388.377.986
Pasal 23	48.995.852	55.150.226
Pasal 25	764.167.646	613.727.614
Pasal 29	3.811.717.511	2.076.687.105
Pajak pertambahan nilai	2.261.350.111	1.787.555.963
Pajak lainnya	622.655.772	605.723.683
Jumlah	8.219.094.398	5.735.786.503

3. PT. Mayora Indah, Tbk.

Pada PT. Mayora Indah, mengakui adanya pajak dibayar dimuka sebagai berikut:

Tabel 7 Pajak dibayar dimuka PT. Mustika Ratu, Tbk

Keterangan	2012	2011
Pajak penghasilan pasal 28a	69.872.503.274	55.297.806.860
Pajak Pertambahan Nilai	271.266.201.211	211.533.645.643
Jumlah	341.138.704.485	266.831.452.503

Pada tanggal 14 Januari 2011, PT Sinar Pangan Timur, entitas anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas PPh badan No. 00009/406/09/641/11 untuk tahun fiskal tahun 2009 sebesar Rp 837.062.044. Perusahaan telah menerima

pengembalian pajak tersebut pada bulan Februari 2011. PT. Mayora Indah Tbk, terdapat pos pajak dibayar dimuka (*prepaid taxes*) pada bagian aset lancar. Besarnya pajak dibayar dimuka (*prepaid taxes*) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp 341.138.704.485 dan Rp 266.831.452.503.

Pajak dibayar dimuka ini didapat dari pajak penghasilan pasal 28a ditambahkan dengan pajak pertambahan nilai (*Value Added Tax*). Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau pajak yang masih harus dibayarkan.

Tabel 8 Aset Pajak Tangguhan PT. Mayora Indah, Tbk

Keterangan	01 Januari 2012	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	31 Desember 2012
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:			
Penyisihan piutang ragu-ragu	68.902.743	(9.313.915)	59.588.828
Biaya transaksi	(986.857.284)	141.729.702	(845.127.582)
Pendapatan bunga	1.507.142.919	419.986.410	1.927.129.329
Liabilitas imbalan pasca kerja	26.915.607.149	13.903.315.038	40.818.922.187
Biaya emisi obligasi	(111.784.147)	(87.765.130)	(199.549.277)
Penyusutan aset tetap	(37.105.695.985)	(11.722.738.617)	(48.828.434.602)
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan	(9.712.684.606)	2.645.213.488	(7.067.471.118)
Aset (liabilitas) pajak tangguhan: entitas anak:			
PT. Torabika Eka Semesta	(6.269.971.599)	(1.605.690.240)	(7.875.661.839)
PT. Kakao Mas Gemilang	2.338.589.666	(111.853.153)	2.226.736.513
Jumlah	(13.644.066.540)	927.670.095	(12.716.396.445)
Aset pajak tangguhan	2.338.589.666		2.226.736.513
Liabilitas pajak tangguhan	(15.982.656.205)		(14.943.132.957)
	01 Januari 2011	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	31 Desember 2011
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:			
Penyisihan piutang ragu-ragu	24.134.962	44.767.781	68.902.743
Biaya transaksi	(165.387.584)	(821.469.700)	(986.857.284)
Pendapatan bunga	833.771.176	673.371.743	1.507.142.919
Liabilitas imbalan pasca kerja	22.245.333.091	4.670.274.058	26.915.607.149
Biaya emisi obligasi	(175.746.197)	63.962.050	(111.784.147)
Penyusutan aset tetap	(35.151.229.892)	(1.954.466.093)	(37.105.695.985)
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan	(12.389.124.444)	2.676.439.839	(9.712.684.606)
Aset (liabilitas) pajak tangguhan: entitas anak:			
PT. Torabika Eka Semesta	(267.686.495)	(6.002.285.104)	(6.269.971.599)
PT. Kakao Mas Gemilang	2.260.998.332	77.591.334	2.338.589.666
Jumlah	(10.395.812.607)	(3.248.253.931)	(13.644.066.540)
Aset pajak tangguhan	2.260.998.331		2.338.589.666
Liabilitas pajak tangguhan	(12.656.810.939)		(15.982.656.205)

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Mayora Indah Tbk, terdapat pos Aset Pajak Tangguhan. Pos tersebut merupakan akumulasi pajak tangguhan perusahaan yang berasal dari beda temporer. Dapat kita lihat per 31 Desember 2011 aset pajak

tanggungan perusahaan adalah Rp 2.338.589.666 sedangkan per 31 Desember 2012 aset pajak tanggungan perusahaan adalah sebesar Rp 2.226.736.513, dari data tersebut dengan kata lain terdapat penurunan aset pajak tanggungan sebesar Rp 111.853.153.

Kemudian, pada bagian Liabilitas Jangka Pendek terdapat pos utang pajak (*Taxes Payable*) per 31 Desember 2012 sebesar Rp 84.222.827.752 dan Rp 6.327.158.707 per 31 Desember 2011. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan jumlah pajak penghasilan terutang baik pasal 21,23,26,29 maupun dari pajak final serta pajak pertambahan nilai.

Tabel 9 Utang Pajak PT. Mayora Indah, Tbk

Keterangan	2012	2011
Pajak Final	1.690.766.689	910.463.109
Pajak Penghasilan		
Pasal 21	5.108.630.047	4.965.543.411
Pasal 23	344.651.763	414.707.854
Pasal 26	2.904.666.969	5.585.918
Pasal 29	65.440.630.801	30.858.415
Pajak Pertambahan Nilai	8.733.481.483	-
Jumlah	84.222.827.752	6.327.158.707

Besarnya pajak terutang Grup ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*). Berdasarkan perubahan ketiga dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada tahun 2007, batas waktu untuk pemeriksaan atau perubahan pajak oleh kantor pajak dikurangi dari 10 tahun menjadi 5 tahun sejak pajak tersebut menjadi terutang dan untuk tahun 2007 dan sebelumnya, batas waktu tersebut akan berakhir pada tahun fiskal 2013.

Laporan Laba Rugi pada Tiga Perusahaan yang Terdaftar di BEI

Setiap perusahaan baik perusahaan terbuka maupun CV pasti memiliki laporan laba rugi, tetapi tidak semua pos-pos laporan laba rugi setiap perusahaan sama. Dalam laporan laba rugi komprehensif, dapat kita lihat terdapat pos beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan merupakan beban pajak penghasilan yang berasal dari pajak penghasilan kini final maupun non final dan pajak penghasilan tanggungan. Berikut ini adalah laporan laba rugi Tiga Perusahaan terdaftar di BEI yang dikaitkan dengan PSAK 46.

1. PT. Astra Internasional, Tbk

Dalam perhitungan beban pajak penghasilan, perusahaan perseroan yang memiliki anak perusahaan haruslah memisahkan pajak yang berasal dari perseroannya dengan pajak yang berasal dari entitas anak perusahaan. Beban pajak penghasilan yang harus diakui harus terdiri dari dua unsur utama, yaitu pajak kini (*current tax*) dan pajak tanggungan (*differed tax*).

Tabel 15 Beban Pajak Penghasilan PT. Astra Internasional, Tbk

	2012	2011
Perseroan		
Kini:		
Tidak final	(1.176)	(909)
Final	(28)	(28)
Tanggungan	112	82
	(1.092)	(855)
Entitas anak		
Kini:		
Tidak final	(4.412)	(4.061)
Final	(126)	(126)
Tanggungan	474	345
	(4.064)	(3.842)
Konsolidasian		
Kini:		
Tidak final	(5.588)	(4970)
Final	(154)	(154)
Tanggungan	586	427
	(5.156)	(4.697)

Dapat kita lihat, beban pajak penghasilan PT. Astra Internasional, Tbk berasal dari pajak kini dan pajak tangguhan perseroan ditambahkan dengan entitas anak. Sehingga menghasilkan beban pajak penghasilan sebesar (Rp. 5.156) per 31 desember 2012 dan Rp (4.697) per 31 Desember 2011 dalam miliran.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian dan hasil perhitungan teoritis laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Keterangan	2012	2011
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	27.898	25.774
Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas	(5.676)	(5.760)
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	22.222	20.014
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	(4.979)	(4.476)
Penghasilan bukan obyek pajak	193	128
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(431)	(457)
Kerugian pajak yang tidak diakui pada tahun berjalan	(96)	(58)
Lain – lain	157	166
Beban pajak penghasilan konsolidasian	(5.156)	(4.697)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perseroan dengan penghasilan kena pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	12,916	12,788
Penyesuaian pajak:		
Pelayanan purna jual	282	218
Beban imbalan kerja	240	139
Insentif dealer	206	97
Pendapatan dividen	(7,345)	(8,692)
Nilai wajar dari properti investasi	(284)	(26)
Penghasilan kena pajak final	(164)	(158)
Iklan dan promosi	(9)	120
Lain-lain	37	57
	(7,037)	(8,245)

Dari data perhitungan di atas, terdapat perbedaan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan adanya penyesuaian pajak. Dimana akun-akun penyesuaian pajak tersebut adalah akun-akun yang diatur oleh PSAK 46.

	2012	2011
Penghasilan kena pajak Perseroan	5,879	4,543
Beban pajak penghasilan kini Perseroan - tidak final	1,176	909
Pembayaran pajak dimuka Perseroan	(1,010)	(849)
Utang pajak penghasilan Perseroan	166	60
Beban pajak penghasilan kini entitas anak tidak final	4,412	4,061
Pembayaran pajak dimuka entitas anak	(3,473)	(3,207)
Utang pajak penghasilan entitas anak	939	854

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena perseroan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan.

2. PT. Mustika Ratu, Tbk

Pada laporan laba rugi PT. Mustika Ratu, beban pajak penghasilan yang berasal dari pajak kini dan tangguhan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Berbeda dengan PT. Astra Internasional, Tbk, yang menjabarkan beban pajak penghasilan di catatan atas laporan keuangan.

Tabel 16 Beban Pajak Penghasilan PT. Mustika Ratu, Tbk

PSAK 46 and
Income Statement

Laba sebelum manfaat pajak penghasilan	42.552.200.238	36.719.868.781
Manfaat (beban) pajak penghasilan		
Kini	(12.671.451.639)	(9.802.151.904)
Tangguhan	870.659.283	950.117.655
Bersih	(11.800.792.356)	(8.852.034.249)

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

41

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	42.552.200.238	36.719.868.781
Bagian laba Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	<u>(21.890.496.419)</u>	<u>(21.523.608.434)</u>
Laba Perseroan sebelum pajak penghasilan	20.661.703.819	15.196.260.347
Beda temporer		
Imbalan kerja	1.620.902.539	1.101.583.687
Penyusutan	<u>(1.110.448.190)</u>	<u>(270.159.570)</u>
Beda tetap		
Beban jamuan tamu, kesejahteraan karyawan, sumbangan dan lain-lain	835.425.945	798.299.130
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak penghasilan final	<u>(040.391.100)</u>	<u>(1.327.544.023)</u>
Taksiran penghasilan kena pajak Perseroan	<u>21.159.193.013</u>	<u>15.498.438.771</u>

Perhitungan beban pajak kini dan taksiran utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Keterangan	2012	2011
Beban pajak kini		
Perseroan	5.289.798.250	3.874.609.750
Entitas Anak dalam negeri	7.356.475.250	5.418.636.500
Entitas Anak luar negeri	25.178.139	508.905.654
Jumlah	12.671.451.639	9.802.151.904
Pajak penghasilan dibayar dimuka		
Perseroan		
Pasal 22	97.000	28.094.031
Pasal 23		122.449
Pasal 25	3.649.956.345	2.859.720.918
	3.650.053.345	2.887.937.398
Entitas Anak dalam negeri		
Pasal 23	115.767.333	123.234.497
Pasal 25	5.068.735.311	4.205.387.250
	5.184.502.644	4.328.621.747
Jumlah	8.834.555.989	7.216.559.145
Taksiran utang pajak penghasilan badan		
Perseroan	1.639.744.905	986.672.352
Entitas Anak dalam negeri	2.171.972.606	1.090.014.753
Jumlah	<u>3.811.717.511</u>	<u>2.076.687.105</u>

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Laba konsolidasian sebelum manfaat beban pajak penghasilan sesuai laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	42.552.200.238	36.719.868.781
Bagian laba Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	(21.890.496.419)	(21.523.608.434)
Laba Perseroan sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	20.661.703.819	15.196.260.347
Pajak penghasilan dengan tarif penghasilan	5.165.425.955	3.799.065.087
Pengaruh pajak atas manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(3.241.292)	(132.311.424)
Jumlah Beban Pajak Perseroan	5.162.184.663	3.666.753.663

Perhitungan manfaat (beban) pajak tanggungan atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Perseroan		
Imbalan kerja	405.225.635	706.004.094
Penyusutan aset tetap	(277.612.048)	(67.539.893)
	127.613.587	638.545.001
Entitas Anak dalam negeri		
Imbalan kerja	(100.946.305)	391.053.917
Penyusutan aset tetap	234.726.167	212.884.147
Peysihan piutang	239.617.204	-
	373.397.066	603.938.064
Entitas Anak luar negeri	369.648.630	(292.365.410)
Manfaat pajak penghasilan tanggungan - bersih	870.659.263	950.117.655

3. PT. Mayora Indah, Tbk

Adapun PT. Mayora Indah, Tbk juga menjabarkan beban pajak penghasilan di catatan atas laporan keuangan.

Tabel 17 Beban Pajak Penghasilan PT. Mayora Indah, Tbk

	2012	2011
Pajak kini		
Pajak tidak final		
Perusahaan	102.738.012.200	54.565.613.600
Entitas anak	113.288.416.500	84.609.773.500
Jumlah	216.026.428.700	139.175.387.100
Pajak final	287.904.000	531.024.000
Jumlah	216.314.332.700	139.706.411.100
Pajak tanggungan	(927.670.095)	3.248.253.932
Jumlah	215.386.662.605	142.954.665.032

Seperti yang telah saya bahas pada sub bab 4.2 bahwa beban pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK 46 timbul akibat adanya apajak kini dan pajak tanggungan. Dapat dilihat pada tabel 4.16, PT Mayora Indah Tbk menjabarkan beban pajak penghasilan seperti yang telah diatur pada PSAK 46. Beban pajak penghasilan tersebut

sebesar Rp 215.386.662.605 diperoleh dari pajak kini yang berasal dari pajak final dan non final dikurangi dengan pajak tangguhan sebesar Rp 927.670.095

PSAK 46 and
Income Statement

	2012	2011
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	959.815.066.914	626.440.817.710
Laba sebelum pajak entitas anak	<u>403.947.413.658</u>	<u>363.290.613.168</u>
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>495.867.653.256</u>	<u>263.150.204.542</u>
Perbedaan temporer:		
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No. 55		
Penyisihan piutang ragu-ragu	(46.569.574)	223.838.907
Biaya transaksi	708.648.510	(4.107.348.502)
Pendapatan bunga	2.099.932.048	3.366.858.713
Beban imbalan kerja jangka panjang	69.516.575.188	23.351.370.283
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(42.296.763.403)	(15.093.002.419)
Perbedaan amortisasi komersial dan fiskal	<u>(184.770.785)</u>	<u>319.810.252</u>
Jumlah	<u>29.797.051.984</u>	<u>8.061.527.235</u>
Perbedaan tetap		
Sumbangan	4.060.651.532	2.597.099.851
Kenikmatan karyawan	1.673.001.729	1.383.889.313
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(17.100.785.707)	(2.948.935.850)
Pendapatan sewa	(890.640.000)	(2.797.440.000)
Lain-lain	<u>283.128.621</u>	<u>3.381.723.072</u>
Jumlah	<u>(11.974.643.825)</u>	<u>1.616.336.386</u>
Laba kena pajak Perusahaan	<u>513.690.061.415</u>	<u>272.828.068.163</u>

43

Tabel 18 Utang pajak PT Mayora Indah Tbk

	2012	2011
Beban pajak kini-Tidak final		
Perusahaan		
20% x Rp 513.690.061.000 tahun 2012	102.738.012.200	-
20% x Rp 272.828.068.000 tahun 2011	-	54.565.613.600
Jumlah	<u>102.738.012.200</u>	<u>54.565.613.600</u>
Entitas anak		
PT Torabika Eka Semesta	99.023.073.250	64.305.786.750
PT Kakao Mas Gemilang	<u>14.265.343.250</u>	<u>20.303.986.750</u>
Jumlah beban pajak kini-Tidak final	<u>216.026.428.700</u>	<u>139.175.387.100</u>
Dikurangi pembayaran pajak di muka		
Perusahaan	79.609.739.651	81.735.685.459
Entitas anak		
PT Torabika Eka Semesta	56.710.714.998	64.274.928.335
PT Kakao Mas Gemilang	<u>28.840.039.664</u>	<u>48.431.721.751</u>
Jumlah	<u>165.160.494.313</u>	<u>194.442.335.545</u>
Utang pajak kini (pajak lebih bayar)-bersih	<u>50.865.934.387</u>	<u>(55.266.948.445)</u>
Rincian utang pajak kini (pajak lebih bayar)		
Perusahaan	23.128.272.549	(27.170.071.859)
Entitas anak		
PT Torabika Eka Semesta	42.312.358.252	30.858.415
PT Kakao Mas Gemilang	<u>(14.574.696.414)</u>	<u>(28.127.735.001)</u>
Jumlah	<u>50.865.934.387</u>	<u>(55.266.948.445)</u>

Adapun perbedaan temporer yang menimbulkan perbedaan pengakuan pada beban pajak penghasilan dengan utang pajak penghasilan diakibatkan dari adanya perbedaan temporer PT Mayora Indah, Tbk yaitu Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK 55, Penyisihan piutang ragu-ragu, biaya transaksi, pendapatan bunga, beban imbalan kerja jangka panjang. Adapun utang pajak kini PT Mayora Indah didapat dari perhitungan beban pajak kini tidak final dikurangi pembayaran pajak dimuka. Dapat kita lihat pada tabel 18.

Laba kena pajak Perusahaan tahun 2011 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak

Pengaruh penerapan PSAK 46 terhadap Laba Rugi

Dalam penyajiannya, PSAK 46 mengakui adanya beban pajak penghasilan yang ditimbulkan dari jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang akan menjadi unsur penambah dari laba (rugi) bersih sebelum pajak. Perbedaan dari pajak terutang dengan beban pajak penghasilan selama yang termasuk perbedaan temporer, dicatat sebagai akun pajak tangguhan baik aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan. Dimana akun tersebut merupakan akun-akun yang ada di neraca sehingga nilainya tidak akan terhapus atau akan tetap ada selama pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Seperti yang telah dibahas pada sub bab 4.2, bahwa dalam PT. Astra Internasional, PT. Mustika Ratu, PT. Mayora Indah, PT. Gudang Garam, dan PT. Aneka Tambang, terdapat perbedaan temporer yang berbeda-beda. Maka saya mencoba untuk membuat tabel agar terlihat perbedaannya.

Tabel 19 Perbedaan Temporer Tiga Perusahaan yang terdaftar di BEI

No	Akun-akun	PT. Astra Internasional, Tbk	PT. Mustika Ratu, Tbk	PT. Mayora Indah, Tbk
1	Liabilitas imbalan kerja	Ada	Ada	Ada
2	Penyusutan aset tetap	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
3	Penyisihan piutang	Tidak Ada	Ada	Ada
4	Pendapatan bunga	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
5	Iklan dan Promosi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Dari daftar tabel diatas, dapat penulis simpulkan bahwa setiap perusahaan terdapat beberapa perbedaan temporer yang mempengaruhi laba sebelum pajak penghasilan atau dasar pengenaan pajak (DPP), yaitu Liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan atas jasa yang dilakukan pekerja. Imbalan kerja dapat berupa imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja.

Pada PT. Astra Internasional Tbk, memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti. Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas biaya jasa lalu yang belum diakui.

Dalam menentukan Liabilitas imbalan pasti PT Astra Internasional Tbk menggunakan jasa aktuaris independen untuk menghitung jumlah kewajiban imbalan pasti menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Dengan kata lain dalam penentuan kewajiban imbalan kerja aktuaris independen pun menggunakan estimasi atau perkiraan menjadi dasar dimana estimasi tersebut berasal dari mendiskontokan arus kas di masa depan. Sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak diperkenankan menggunakan dasar estimasi dalam perhitungan kewajiban imbalan kerja tersebut, dasarnya adalah hanya beban yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan atau iuran yang telah dibayarkan ke pegawainya pada periode tersebut kecuali disetujui oleh Direktur Jendral Pajak.

Oleh karena itu perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan pengakuan beban imbalan kerja. Menurut PSAK 46, selisih dari perbedaan temporer tersebut akan menimbulkan pajak tangguhan, baik aset pajak tangguhan ataupun liabilitas pajak tangguhan.

Disebutkan pada catatan atas laporan keuangan PT. Astra Internasional bahwa terdapat perbedaan temporer yang timbul dari pengakuan liabilitas imbalan kerja adalah sebesar Rp 240 (dalam miliaran). Nilai tersebut merupakan selisih pengakuan beban imbalan kerja yang diakui oleh perusahaan dengan yang diperkenankan oleh Direktur Jendral Pajak. Dengan kata lain terdapat selisih pengakuan atas kewajiban imbalan kerja. Perbedaan temporer yang timbul akan mengakibatkan koreksi fiskal positif sehingga akan menambah laba sebelum pajak penghasilan perusahaan karena terlalu besar mengakui beban tersebut. Oleh karena itu menurut perpajakan nilai kewajiban imbalan kerja yang disetujui oleh DJP yaitu sebesar Rp. 2.501 (dalam miliaran). Nilai tersebut didapat dari beban imbalan kerja sebesar Rp 2.741 dikurangi perbedaan temporer liabilitas imbalan kerja sebesar RP 240.

Sedangkan pada PT. Mustika Ratu Tbk, Perhitungan imbalan pasca-kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada awal periode pelaporan diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan yang berpartisipasi.

PT. Mustika Ratu Tbk pada catatan atas laporan keuangan menyebutkan bahwa beban imbalan kerja yang diakui perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 2.972.421.266. Nilai tersebut merupakan liabilitas perusahaan yang masih terutang, sehingga akan meningkatkan kewajiban imbalan kerja PT Mustika Ratu Tbk. Dari nilai tersebut terdapat perbedaan temporer yang timbul dari pengakuan kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 1.620.902.539. Dengan kata lain terdapat selisih pengakuan atas kewajiban imbalan kerja. Perbedaan tersebut akan mengakibatkan koreksi fiskal positif dimana akan menambah laba sebelum pajak penghasilan. Oleh karena itu menurut perpajakan nilai kewajiban imbalan kerja yang disetujui oleh DJP adalah sebesar Rp 1.351.518.727.

Dari koreksi fiskal tersebut akan menimbulkan aset pajak tangguhan, karena pada saat nilai tersebut dipulihkan dapat menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Aset pajak tangguhan yang timbul adalah sebesar Rp 405.225.635. Nilai tersebut berasal dari perbedaan temporer atas kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 1.620.902.539 dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%.

Pada PT. Mayora Indah Tbk, Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial yang melebihi batas koridor atau lebih besar daripada 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini imbalan pasti dibebankan atau dikreditkan ke komponen laba rugi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan, sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (*vested*).

PENUTUP

Dari pembahasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Dalam laporan posisi keuangan PT. Astra Internasional Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, terdapat akun Aset Pajak Tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang ada

- 2) Pada bagian laporan laba rugi PT. Astra Internasional Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, PT Mayora Indah Tbk, adanya beban pajak penghasilan yang timbul dari hasil beban pajak kini ditambahkan dengan beban pajak tangguhan.
- 3) Pada bagian laporan posisi keuangan, terdapat akun aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang menyebabkan koreksi fiskal positif yang berdampak pada bertambahnya nilai laba sebelum pajak penghasilan, sedangkan akun liabilitas pajak tangguhan timbul dari adanya koreksi fiskal negatif yang berdampak pada berkurangnya nilai laba sebelum pajak penghasilan perusahaan.
- 4) Pengaruh dari penerapan PSAK 46 adalah akan terjadinya perbedaan antara beban pajak penghasilan berupa nilai pajak penghasilan yang diakui oleh perusahaan dengan utang pajak penghasilan yang merupakan pajak penghasilan terutang yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, yang timbul akibat adanya perbedaan temporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak.2011.Pajak Penghasilan (PPH).<http://www.pajak.go.id>
- Gunadi.2004. Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang – Undang Pajak Baru, PT Grasindo. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan No.1 tentang Penyusunan Laporan Keuangan per tanggal 15 Desember 2009.Salemba Empat Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. Standar Akuntansi Keuangan No.46 tentang Pajak Penghasilan per tanggal 9 Agustus 2010.
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., Warfield, Terry D.2011.Intermediate Accounting, Volume 1.Willey.Ney York
- Lumbantoruan, Sophar. 1997. Ensiklopedi Perpajakan Indonesia.Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo, Edisi Revisi 2009, Perpajakan,Andi. Yogyakarta.
- Meliala, Tulis S., Francisca Widianti Oetomo. 2008.Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Edisi 5, Semesta Media. Jakarta.
- Meliala, Tulis S.2006. Perpajakan dan Akuntansi Pajak.Edisi 3.Mitra Wacana Media. Jakarta
- Muljono, Djoko.2006. Akuntansi Pajak, C.V. Andi Offset. Yogyakarta.
- Natalia, P. dan Mulyana, Mumuh, *Pengaruh Periklanan Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian*, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol. 2 No. 2, 2014 ISSN 2337 – 7860, pp. 119-128
- Purba, Marisi P., Andreas. 2005. Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan IAS No.12 dan PSAK No.46. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan:Teori dan Kasus. Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Reeve, James M., Carls S.Warrem, Jonathan E. Duchac. 2009. Principal of Accounting Indonesia Adaptation. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemarso, 2004. Akuntansi Suatu Pengantar. Salemba Empat. Jakarta.
- Stice, Earl K., James D. Stice, dan K. Fred Skousen, 2009. Intermediate Accounting.Edition 13, International Thomson Publishing. Ohio
- Suandi, Erly. 2008. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta..
- Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2001. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Wicaksono, Bimo Satrio. Pajak Kini dan Pajak Tangguhan. <http://jagalan.blog.uns.ac.id> (Diakses 2 September 2012)
- William, Jan., Haka, Susan. 2003. Financial Accounting. MC Graw Hill. New York